DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR v
PRAKATA vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR GAMBAR xix

Bagian Pendahuluan:Beberapa Pengertian Dasar
BAB 1 DEFINISI DAN LAPANGAN HUKUM PIDANA 1
BAB 2 PEMBAHARUAN KUHP DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA 17
2.1 Pendahuluan 17
2.2 Pembaharuan KUHP 19
2.3 Hubungan Antara Pembaharuan KHUP dengan Pembaharuan Hukum Pidana . 23
BAB 3 SISTEM PERADILAN PIDANA 29
3.1 Peristilahan 29
3.2 Tujuan dari Kajian tentang SPP 37
3.3 Bekerjanya SPP Berdasarkan KUHP .. 40

Bagian Pertama: Tindak Pidana
BAB 4 TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2004 51
4.1 Latar Belakang Ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 53
4.2 Azas dan Tujuan 54
4.3 Beberapa Batasan Pengertian 55
4.4 Jenis Tindak Pidana 56

4.5 Kualifikasi Delik 58
4.6 Upaya-upaya Non Penal 59
BAB 5 TINDAK PIDANA PRAKTIK KEDOKTERAN DALAM UU NOMOR 29 TAHUN 2004 DAN PENEGAK HUKUMNYA 61
5.1 Pendahuluan 61
5.2 Fokus Bahasan 64
5.3 Tindak Pidana Praktik Kedokteran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran 64
5.4 Malpraktik Medik (*Medical Malpractice*): Antara UU Nomor 29 Tahun 2004 dan KUHP 74
5.5 Penanganan dan Penegakan Hukum Atas Pengaduan Dugaan Malpraktik Medik Berdasarkan UUPK 79
5.6 Kesimpulan 85
5.7 Saran 88
BAB 6 KEJAHATAN KORPORASI: PENGERTIAN, PERKEMBANGAN PENGATURAN, DAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI 91
6.1 Pengertian Korporasi dan Kejahatan Korporasi 91
6.2 Anatomi Kejahatan Korporasi 99
6.3 Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 102
6.4 Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 110
BAB 7 IMPLEMENTASI TEORI PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA KORPORASI KAITANNYA DENGAN KEJAHATAN KORPORASI 115

7.1 Latar Belakang Masalah 115
7.2 Rumusan Masalah 119
7.3 Metode Penelitian 120
7.4 Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Kejahatan Korporasi dan Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 123
7.5 Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 130
7.6 Upaya Penanggulangan Kejahatan Korporasi 137
7.7 Kesimpulan 153
7.8 Saran 156
BAB 8 EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA 159
8.1 Pendahuluan 159
8.2 Euthanasia dalam KUHP 160
8.3 Kesimpulan 165

Bagian Kedua: Pidana dan Pemidanaan
BAB 9 SISTEM SANKSI PIDANA DAN PEMIDANAAN DI INDONESIA 167
9.1 Pidana Pokok 171
9.2 Pidana Tambahan 175
9.3 Tindakan 177
9.4 Pidana Bersyarat 178
9.5 Pelepasan Bersyarat 180
BAB 10 KEBIJAKAN TENTANG PENGATURAN PIDANA MATI DALAM RUU KUHP 183
10.1 Pendahuluan 183
10.2 Kontroversi Pidana Mati 186
10.3 Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia 190

10.4 Pidana Mati Dalam Konsep KUHP: Perbandingannya Dengan Dokumen-dokumen Internasional Tentang HAM .. 194
10.5 Penutup 211
BAB 11 KEBIJAKAN PENGGUNAAN SANKSI PIDANA DALAM HUKUM ADMINISTRASI 213
11.1 Pengertian Sanksi 213
11.2 Sanksi Pidana dan Batas-batas Kemampuannya 215
11.3 Penggunaan Sanksi Pidana Dalam Hukum Administrasi 218
BAB 12 BEBERAPA IMPLIKASI DARI PENGGUNAAN SANKSI PIDANA DALAM HUKUM ADMINISTRASI 223
12.1 Apakah Merupakan UU Pidana Khusus atau Hukum Pidana Khusus 224
12.2 Apakah Merupakan Ultimum Remedium atau Primum Remedium .. 236
12.3 Apakah Merupakan Kriminalisasi atau Penalisasi 247
BAB 13 RE-EVALUASI DAN RE-ORIENTASI PENGGUNAAN SANKSI PIDANA DALAM HUKUM ADMINISTRASI 261
13.1 Re-evaluasi dan Re-orientasi Penggunaan Sanksi Pidana Dalam Hukum Administrasi 261
13.2 Re-orientasi Penggunaan Sanksi Pidana Dalam Hukum Administrasi 264
13.3 Perumusan Kualifikasi Delik (Kejahatan atau Pelanggaran) 283
13.4 Perumusan Pedoman Pemidanaan untuk Ancaman Pidana Minimal Khusus 287
13.5 Pengaturan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana 291
13.6 Perumusan Format Titel Tentang "Sanksi" 296
13.7 Penetapan Pola Pemidanaan 300
BAB 14 PEMBENTULAN PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL (*INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*) DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM PIDANA INTERNASIONAL 309
14.1 Pendahuluan 309
14.2 Permasalahan 311
14.3 Terjemahan Istilah International *Criminal Court* 312
14.4 Ilmu Hukum Pidana Internasional Setelah Pembentikan ICC 314
14.5 Kedudukan Pengadilan (Pidana) Nasional Setelah Pembentukan ICC ... 320
14.6 Penutup 327

DAFTAR PUSTAKA 329
INDEKS HAL 343
INDEKS NAMA 347
DAFTAR ISTILAH (GLOSARIUM) 351